

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Konsep pembelajaran bagi anak jalanan melalui Rumah Singgah telah dilakukan sejak tahun 1993, diawali melalui pilot projek yang diselenggarakan di Pasar Pulau Gadung Jakarta Timur, dengan kegiatan mengutamakan pada proses *need assessment*. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk; (1) anak memiliki cara hidup yang sehat dan mandiri, (2) meninggalkan kehidupan jalanan dan kembali ke keluarga/pesantren/ panti, (3) melakukan alih kerja, ke pekerjaan yang lebih baik daripada di jalanan, (4) anak tetap bersekolah meskipun harus terus berada di jalanan dan (5) mengurangi resiko kehidupan yang dialami anak selama anak harus berada di jalan. Pada tahun 1994 Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) membentuk Rumah Singgah Anak Jalanan (*open house for street children /OHSC*), yang merupakan lembaga semi institusional berupa senter atau panti sederhana dan terbuka yang berfungsi sebagai fasilitator antara anak-anak dengan keluarganya. Tujuan utama rumah singgah anak jalanan (RSAJ) adalah mengembalikan anak kepada keluarganya dengan alternatif lain adalah; tinggal bersama saudaranya, masuk panti, mengontrak rumah sendiri maupun berkelompok, atau anak mengikuti keluarga pengganti. Pada tahun 1995 sebagai tahun kedua uji coba RSAJ dievaluasi dengan hasil bahwa pencapaian tujuan memerlukan waktu yang panjang dan sangat sulit, sehingga ditetapkan tujuan jangka pendek, yakni untuk memperkuat pertahanan diri anak dalam menghadapi bahaya jalanan seperti merokok, berjudi, berkelahi, mabuk-mabukan, penyimpangan seksual, dan

kejahatan, sehingga anak diharapkan memiliki sikap yang normatif dan pandangan hidup yang positif. Hasil dari program rumah singgah anak jalanan diketahui bahwa rumah singgah dapat diterima oleh anak, karena anak merasa diperlakukan secara formal, dan mereka masih mempunyai kebebasan untuk melakukan pekerjaan di terminal, dapat dijadikan tempat dimana anak jalanan bebas mengungkapkan perasaan dan pikirannya pada pekerja sosial dan dengan adanya rumah singgah mereka menganggap sebagai rumahnya sendiri serta mereka mengenal istilah pulang. Hasil program tersebut direkomendasikan ke YKAI maupun ke Departemen Sosial (Depsos), sehingga pada tahun 1996 Depsos bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP) menerapkan di 12 kota besar di Indonesia yakni; Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Mataram, Lampung, Palembang, Medan, Padang dan Ujung Pandang.

Penerapan rumah singgah (*open house*) hasilnya dievaluasi pada tahun 1999 melalui Capacity Building in Planning and Evaluating Programmes for Street Children Project yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya bersama Departemen Sosial di 7 (tujuh) kota besar yakni di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang. Evaluasi program menghasilkan temuan-temuan antara lain; (1) persepsi anak jalanan, orang tua anak jalanan, pemberi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap rumah singgah pada umumnya menilai positif karena rumah singgah dapat memberikan manfaat baik dari segi manfaat fisik, material maupun manfaat non material, (2) konsep rumah singgah yang diimplementasikan baik oleh rumah singgah UNDP maupun rumah singgah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

sudah cukup baik, mengingat pengembangannya dilakukan guna merespon sebagian dari kebutuhan dan situasi yang dihadapi di lapangan.

Bentuk layanan yang diberikan di rumah singgah, merupakan suatu proses pembelajaran yang diberikan kepada anak dalam situasi khusus yakni anak yang mengalami bencana sosial dan mengalami hambatan dalam kepemilikan dari segi ekonomi, sebagaimana tersurat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa; "Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi"

Dalam situasi khusus, anak jalanan memiliki permasalahan yang kompleks, baik fisik, psikhis, sosial, budaya dan pendidikan, yang seringkali berhadapan dengan dunia kekerasan, kriminalitas, penyimpangan seksual, penyalahgunaan narkoba, keterlantaran dan lain sebagainya sebagai akibat anak hidup di jalanan, sehingga diperlukan perlindungan khusus.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15;

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penyelenggaraan pembelajaran di rumah singgah, tidak selamanya berjalan sesuai dengan gambaran hasil evaluasi PKPM Unika Atma Jaya, karena ternyata anak jalanan secara empirik khususnya di kota-kota besar di Jawa Barat masih

banyak ditemui, dan terkesan terus bertambah. Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 1999 di Jawa Barat terdapat 6.265 orang, sedangkan pada tahun 2006 melonjak menjadi 20.665 orang., sehingga terjadi lonjakan hampir 350 %, terutama pada kota-kota besar seperti di Bandung, Bekasi, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya dan Ciamis.

Adapun sebaran anak jalanan di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1

TABEL 1.1  
SEBARAN ANAK JALAN DI JAWA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Orang)	%
1.	Kota Bandung	4.626	22,39
2.	Kabupaten Bandung	1.082	5,24
3.	Kota Cirebon	552	2,67
4.	Kabupaten Cirebon	1.104	5,34
5.	Kabupaten Majalengka	1.105	5,35
6.	Kabupaten Garut	557	2,70
7.	Kota Bekasi	1.932	9,35
8.	Kabupaten Bekasi	1.104	5,34
9.	Kota Bogor	2.195	10,62
10.	Kabupaten Bogor	828	4,01
11.	Kota Sukabumi	391	1,89
12.	Kabupaten Sukabumi	276	1,34
13.	Kota Tasikmalaya	1.119	5,41
14.	Kabupaten Tasikmalaya	276	1,33
15.	Kabupaten Ciamis	1.098	5,31
16.	Kabupaten Kuningan	78	0,38
18.	Kab. Indramayu	158	0,76
19.	Kabupaten Sumedang	364	1,76
20.	Kabupaten Karawang	556	2,69
21.	Kabupaten Subang	552	2,67
22.	Kabupaten Purwakarta	246	1,19
23.	Kota Depok	466	2,26
<b>J U M L A H</b>		<b>20.665</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.

Penambahan populasi demikian berkaitan dengan beberapa faktor, yakni; 1) menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga angka kemiskinan di Jawa Barat bertambah. Pada tahun 2006 penduduk miskin di Jawa Barat yang mendapat subsidi langsung tunai (SLT) menurut Biro Pusat Statistik Jawa Barat sebanyak 2.905.202 KK. Apabila setiap KK miskin terdiri dari 4 jiwa, maka penduduk miskin di Jawa Barat berkisar 11.620.808 jiwa, atau 29,01 % dari jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 39.959.161 jiwa, 2) tidak semua penduduk yang berurbanisasi ke kota-kota besar di Jawa Barat mendapatkan pekerjaan dan hidup layak, sehingga sebagian dari anak-anak mereka terpaksa turun ke jalanan dan 3) walaupun rumah singgah bukan satu-satunya program yang digulirkan untuk penanganan masalah anak jalanan, namun program rumah singgah bernilai strategis untuk memberikan berbagai pelayanan sosial, ekonomi dan pendidikan bagi penyandang masalah anak jalanan. Konsekuensinya, bahwa masih tingginya penyandang masalah anak jalanan berkaitan erat dengan perlunya peningkatan efektifitas pembelajaran di rumah singgah. Hal ini sekaligus untuk menjawab fenomena hasil kajian Departemen Sosial RI melalui Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, dalam Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah (2002:1-2) menyatakan bahwa; “rumah singgah gagal dalam membangun sistem jaringan rujukan dan penyaluran dalam penanganan anak jalanan, serta masyarakat merasa tidak yakin dengan kinerja rumah singgah sehingga memperkuat stigma negatif terhadap anak jalanan dan LSM yang menyelenggarakan rumah singgah”.

Apabila kondisi demikian terus berjalan, akan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan penyelenggaraan pembelajaran di rumah singgah serta hilangnya sebagian modal finansial maupun modal sosial.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Menurut Departemen Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial dalam Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah (1999: 4 - 8) bahwa rumah singgah merupakan wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, dengan tujuan untuk; 1) membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, 2) mengupayakan anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan, dan 3) memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.

Dari makna rumah singgah demikian, maka penyelenggaraan pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah dapat dipandang sebagai sistem pembelajaran yang merupakan interaksi antara berbagai komponen *raw input*, *instrumental input*, *environmental input*, *proses*, *output*, *outcomes* dan *impact*. *Raw input*, yakni warga belajar (anak jalanan) yang memiliki berbagai permasalahan sosial-psikologis, sosial-ekonomi, pendidikan kesehatan, kriminalitas dan masalah-masalah lain sebagai akibat hidup di jalanan. *Environmental Input*, yakni lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar, letak geografis, jaringan transportasi dimana terjadi mobilitas anak dan, tempat tinggal maupun tempat mangkal anak serta letak dan situasi rumah singgah. *Instrumental Input*, yakni sumber dan fasilitas yang dapat menunjang warga belajar melakukan pembelajaran, berupa modul/literatur, alat keterampilan, metode dan strategi pembelajaran, pembimbing dan pengelola. *Proses*, yakni serangkaian interaksi edukatif, yang melibatkan pengelola rumah singgah, fasilitator, dan warga belajar



serta pihak-pihak terkait dengan pembelajaran, berupa bimbingan mental sosial, mental-ideologis, mental-spiritual dan bimbingan keterampilan termasuk di dalamnya pendidikan watak keagamaan, bimbingan belajar, pelatihan olah raga dan bermain, pelatihan seni dan kreatifitas, pemberdayaan orang tua anak jalanan, serta pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C), serta life skill dan keaksaraan fungsional. *Output*, yakni warga belajar yang mengalami peningkatan kompetensi moral, spiritual, intelektual, dan profesional (pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang mengarah pada warga belajar yang mandiri dan produktif.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sistem pembelajaran di rumah singgah saat ini adalah:

1. Penyelenggaraan pembelajaran di rumah singgah secara konseptual menggambarkan proses yang logik dan sistematis, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta subyek warga belajar sesuai kriteria anak jalanan, namun dalam tataran implementasi terjadi pembiasaan, sehingga pembelajaran dapat dipandang sebagai kegiatan rutinitas yang kurang mendayagunakan sumber belajar secara optimal, serta terkesan sebatas untuk melaksanakan target sebuah program yang direncanakan secara top-down.
2. Adanya image negatif masyarakat terhadap efektivitas pembelajaran di rumah singgah. Hal ini tampak bahwa semakin banyak rumah singgah, populasi warga belajar (anak jalanan) semakin bertambah, dimana pada tahun 1999 di Jawa Barat terdapat 6.265 orang anak jalanan, sedangkan pada tahun 2003 terdapat 20.665 orang, atau terjadi lonjakan hampir 350 %. sehingga pelaksanaan pembelajaran nampak kurang efektif.
3. Pembelajaran di Rumah Singgah kurang didasarkan atas kebutuhan belajar, mengingat pada umumnya program-program yang dipersiapkan tanpa kurang



terkait dengan kompleksitas permasalahan anak jalanan seperti masalah sosial psikologis, ekonomi keluarga, pendidikan dan keterampilan, pengangguran, putus sekolah, kriminalitas dan kekerasan, penyimpangan seksual, eksploitasi, kekerasan, kesehatan, dan masalah lain sebagai akibat hidup di jalanan, sehingga program pembelajaran menjadi kegiatan yang kurang merangsang minat belajar warga belajar.

4. Penyelenggaraan pembelajaran di rumah singgah kurang mendayagunakan pendekatan multi sektoral dan profesi sebagai sumber dan potensi pembelajaran.
5. Penyelenggaraan pembelajaran kurang melibatkan warga belajar sebagai subyek yang dapat berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan, sehingga warga belajar menjadi sasaran target yang dipersiapkan untuk mengikuti dan mentaati tanpa memahami manfaat dan tujuan dari pembelajaran.

### C. PERUMUSAN MASALAH

Rumah Singgah Anak Jalanan sebagai Model Pembelajaran telah diuji cobakan pada tahun 1993 dan sejak tahun 1996 diberlakukan secara nasional di kota-kota besar di Indonesia termasuk di Jawa Barat, memiliki harapan besar untuk pemecahan masalah anak jalanan, namun secara empiris populasi anak jalanan terus meningkat.

Peningkatan populasi anak jalanan disebabkan oleh multi faktor baik internal maupun eksternal. Secara eksternal berhubungan erat dengan belum efektifnya pengelolaan program pembelajaran yang kurang dikelola secara kolaboratif. Pengelolaan program pembelajaran secara kolaboratif akan membangun model pembelajaran yang dikelola secara lintas disiplin ilmu dan



lintas sektor, sehingga model pembelajaran yang dikembangkan memiliki possibility yang efektif untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan warga belajar. Untuk itu yang menjadi permasalahan umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kemandirian anak jalanan”?

Dari perumusan permasalahan secara umum tersebut, dijabarkan pada perumusan masalah secara khusus, yakni:

1. Bagaimanakah model pengelolaan program pembelajaran di rumah singgah saat ini?
2. Bagaimanakah model konseptual pengelolaan program pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kemandirian anak jalanan di rumah singgah?
3. Bagaimanakah implementasi model konseptual pengelolaan program pembelajaran kolaboratif dan bagaimana efektivitasnya untuk memandirikan anak jalanan?

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Sebagai acuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep yang digunakan, dengan definisi operasional sebagai berikut:

##### **1. Pengembangan Model**

###### **a. Model**

Model dapat dimaknai sebagai suatu visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Sejalan dengan pendapat Danin (1998) dalam Anwar (2003:37), bahwa model adalah ‘suatu disain yang disederhanakan dari suatu system kegiatan dan dapat mewakili system yang



sesungguhnya. Kemudian Law dan Kelton memaknai bahwa model sebagai representasi sebuah system, dimana ia dipandang mewakili system yang sesungguhnya'.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mills bahwa model adalah 'bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terrepresentasi dari model itu' (Danin,1998) dalam Anwar (2003:38)

Difinisi di atas menggambarkan bahwa model didisain untuk mewakili realitas sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah suatu realitas dari dunia yang sebenarnya, sehingga model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi guru, fasilitator, tutor dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.

#### **b. Model Yang Efektif**

Model dikatakan efektif apabila implementasi kerangka konseptual tentang pengorganisasian pengalaman belajar dan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dapat mencapai tujuan secara optimal pada skala waktu yang telah ditentukan. Oleh karena pembelajaran tersebut berlangsung di rumah singgah, maka tujuan yang hendak dicapai selain anak jalanan yang mandiri di rumah singgah, sebagai persiapan hidup mandiri di masyarakat, juga tumbuhnya semangat kolaborasi pada semua komponen yang berkolaborasi.

### **c. Pengembangan Model**

Pengembangan model diartikan sebagai proses disain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya, melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan.

## **2. Pengelolaan Program Pembelajaran Kolaboratif**

### **a. Pengelolaan**

Pengelolaan dalam hal ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, yakni organisasi rumah singgah.

### **b. Program**

Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu “rancangan mengenai azas serta usaha yang akan dijalankan” (2005:897). Hal ini dimaknai bahwa program adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dirancang secara rasional untuk mencapai tujuan dengan mendayagunakan berbagai sumber. Sumber-sumber dimaksud adalah manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar (*Men-Money-Materials-Machines-Methods-Markets*), sehingga tujuan dapat dicapai dalam batas waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Program dapat diartikan pula sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi (lembaga) dengan memuat komponen tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat, biaya, dan organisasi penyelenggaraan.

### **c. Pembelajaran**

Pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematis dan disengaja oleh pembelajar untuk menciptakan kondisi-kondisi agar warga belajar melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru.

### **d. Kolaboratif**

Kolaborasi adalah suatu proses yang didasarkan pada prinsip kerjasama, yang menghasilkan kepercayaan, integritas dan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Kolaborasi dapat pula diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilandasi adanya saling percaya, integritas dan kesetaraan, konsensus dalam perumusan visi, rasa kepemilikan dan adanya keterpaduan dalam aspek organisasi untuk mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan, sehingga kolaborasi memiliki makna sebagai suatu pendekatan utama yang menggantikan pendekatan hierarki dalam prinsip-prinsip pengorganisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan kerja.

### **e. Pengelolaan Program**

Pengelolaan program diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi (lembaga) yang memuat komponen tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat, biaya, dan organisasi penyelenggaraan.

#### **f. Pembelajaran Kolaboratif**

Pembelajaran kolaboratif diartikan sebagai upaya sistematis yang sengaja dilakukan melalui kerjasama antara sumber belajar (pembelajar) beserta warga belajar melalui penciptaan situasi yang mendukung warga belajar dalam melakukan kegiatan belajar sehingga hasil belajarnya optimal. Kegiatan tersebut dilakukan secara kerjasama yang saling menguntungkan antara pembelajar yang memiliki berbagai keahlian dengan warga belajar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang beragam, dimana peranan pembelajar dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran sehingga potensi dan kemampuan warga belajar dapat dikembangkan secara optimal.

#### **g. Pengelolaan Program Pembelajaran Kolaboratif**

Pengelolaan program pembelajaran kolaboratif yakni rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif dalam upaya merealisasikan tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan secara sistematis, sehingga warga belajar dapat melakukan kegiatan belajar secara bekerjasama yang saling menguntungkan, saling memberikan tanggung jawab, otoritas dan tanggung gugat antara pembelajar dengan warga belajar, pengelola dan stakeholders, agar warga belajar dapat mengoptimalkan kemampuannya.

#### **h. Model Pembelajaran Kolaboratif**

Model pengelolaan pembelajaran kolaboratif adalah suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara pembelajar dengan warga belajar melalui upaya yang sistematis untuk menciptakan agar warga belajar dapat melakukan kegiatan

belajar, dengan saling memberikan tanggung jawab, otoritas dan tanggung gugat demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### **i. Model Pengelolaan Program Pembelajaran Kolaboratif**

Model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif adalah kerangka konseptual yang menggambarkan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif, sasaran, isi dan jenis kegiatan secara sistematis, sehingga warga belajar dapat melakukan kegiatan belajar secara bekerjasama yang saling menguntungkan, saling memberikan tanggung jawab, otoritas dan tanggung gugat antara pembelajar dengan warga belajar, pengelola dan stakeholders.

### **3. Kemandirian Anak Jalanan Di Rumah Singgah**

#### **a. Kemandirian**

Mandiri adalah suatu sikap individu yang ditandai adanya kemauan dan kemampuan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya secara sah, wajar, dan bertanggung jawab. Sedangkan kemandirian adalah "suatu keadaan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 625). Kemandirian dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu keadaan anak jalanan yang mampu melakukan aktivitas keseharian secara normatif di rumah singgah, dan memiliki pengetahuan, sikap serta keterampilan sebagai bekal yang dipersiapkan untuk hidup mandiri di masyarakat.



### **b. Anak Jalanan**

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dan Departemen Sosial, bahwa anak jalanan diartikan sebagai “anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkeliaran di jalanan dan mencari nafkah di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya” (Sudrajat, 1998: 1). Pendapat lain dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat (2001: 3), bahwa anak jalanan adalah “anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Mereka menggunakan jalan sebagai area untuk pemenuhan kebutuhannya, misal untuk bermain dan mencari nafkah guna kelangsungan hidupnya”

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa anak jalanan memiliki dua kategori; (1) anak yang hidup di jalanan, dan (2) anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan. Pendapat serupa dikemukakan oleh L’Krapin dalam Ishaq (2000:6), bahwa anak jalanan dibagi dalam dua kategori, yakni: (1) anak yang bekerja di jalan, karena dorongan lingkungan keluarga, dan ajakan temannya, berasal dari masyarakat terisih dan tata pembangunan kota dan pengembangan ekonomi makro sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mengorbankan anaknya bekerja di jalanan, dan (2) anak menghabiskan waktunya di jalan sebagai gelandangan, tak berhubungan lagi dengan orang tuanya, hanya sedikit waktunya untuk bekerja, tak mempunyai rumah tinggal, sehingga hidup di sembarang tempat seperti gerbong kereta api, bawah jembatan, taman kota/alun-alun dan tempat umum lainnya.

### **c. Rumah Singgah**

Rumah Singgah diartikan sebagai model pelayanan sosial informal tahap awal, khususnya bagi anak jalanan dengan memberikan suasana aman, nyaman,

menarik, dan menyenangkan sebagaimana layaknya dalam keluarga utuh, sehingga berlangsung proses resosialisasi system nilai dan norma yang berlaku serta wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang membantu

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini menyangkut 2 (dua) aspek, yakni aspek akademik dan aspek praksis.

##### **1. Tujuan Akademik**

Tujuan secara akademik adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif di rumah singgah dalam satuan Pendidikan Luar Sekolah.

##### **2. Tujuan Praksis**

- a. Untuk memperoleh gambaran model pengelolaan program pembelajaran di rumah singgah saat ini.
- b. Untuk memperoleh gambaran model konseptual pengelolaan program pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kemandirian anak jalanan di rumah singgah.
- c. Untuk mengembangkan implementasi model konseptual pengelolaan program pembelajaran kolaboratif dan efektivitasnya untuk memandirikan anak jalanan.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian dapat memperoleh temuan teoritis dan praktis bagaimana model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kemandirian anak jalanan di rumah singgah.

1. Secara teoritis, penelitian ini akan dijadikan bahan masukan bagi pendalaman konsep pendidikan luar sekolah, khususnya model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif untuk kemandirian anak jalanan di rumah singgah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi;  
(a) lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dalam mengelola program pembelajaran bagi anak jalanan, (b) pengelola rumah singgah dalam mendayagunakan komponen pembelajaran secara kolaboratif, dan (c) peneliti lain mendapatkan referensi awal untuk melakukan penelitian lanjutan.

#### **G. ASUMSI**

Pembelajaran di rumah singgah memiliki karakteristik utama yang berbeda dengan setting pembelajaran lainnya. Karakteristik utama menyangkut aspek warga belajar, pembelajar dan aspek kurikulum. Warga belajar adalah anak jalanan yang memiliki kompleksitas permasalahan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial psikologis, pendidikan dan masalah lainnya sebagai akibat hidup dijalan. Pembelajar adalah seorang profesional yang memiliki kompetensi dan jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan pada profesinya khususnya dalam pelayanan dan pemulihan masalah anak jalanan. Kurikulum didesain dengan memuat program, tujuan, rancangan proses kegiatan pembelajaran, materi, metoda, media, evaluasi, alat ukur dan indikator keberhasilan belajar yang difokuskan pada prevensi, rehabilitasi dan pengembangan potensi serta menjawab kebutuhan belajar warga belajar.

Ketiga karakteristik utama tersebut menuntut pengembangan suatu model yang dapat menjawab substansi permasalahan anak jalanan. Kontribusi pendidikan luar sekolah dalam pengembangan model tersebut sangat penting, baik sebagai

substitusi, komplemen maupun sebagai suplemen karena anak jalanan pada umumnya putus sekolah formal serta sebagai jembatan terhadap dunia kerja.

Pengembangan model dalam penelitian ini terfokus pada pengelolaan program pembelajaran yang memadukan berbagai kegiatan sebagai untuk menjawab adanya kecenderungan kegiatan pembelajaran di rumah singgah dilakukan secara sporadis. Oleh karena itu perlu pengembangan model pengelolaan program pembelajaran secara integratif, partisipatif dan kolaboratif, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kemandirian anak jalanan di rumah singgah sebagai landasan kemandirian anak jalanan di masyarakat. Pengembangan model pengelolaan pembelajaran kolaboratif, merupakan alternatif pemecahan masalah anak jalanan, dengan menganalisis permasalahan, potensi, nilai manfaat dan kendala serta hambatannya.

Esensi kolaboratif adalah terletak pada sukarela, kerjasama, kesetaraan, kesepakatan, dan kesamaan tujuan pada semua komponen, sehingga memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program. Komponen kolaboratif tersebut adalah warga belajar, pengelola rumah singgah, tutor dan stake holder, yang bekerja secara lintas sektor dan lintas profesi.

Kolaborasi itu sendiri dapat dijadikan strategi pengembangan model pembelajaran, karena dalam implementasi model tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan diantara komponen kolaboratif, sehingga kolaborasi dipergunakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik. (Sumidjo, 1999:32). Strategi kolaborasi memberikan makna; 1) memperoleh solusi yang integratif pada saat semua hal yang berkepentingan sangat perlu untuk dipadukan, 2) menyatukan pendapat orang yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, dan 3) bekerja dengan perasaan adanya hubungan kekeluargaan, sehingga kolaborasi menekankan

pada pemecahan masalah, dan bertujuan memaksimalkan kepuasan dari semua pihak. Strategi lain yang dipergunakan dalam pengembangan model ini adalah;

**Pertama, *Community organization***, dimaksudkan bahwa strategi pengembangan model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif mengacu kepada pendayagunaan potensi anak jalanan dengan tujuan untuk membentuk kembali perilaku normatif dan mengubah kondisi sosial ekonomi dengan mengorganisasikan kelompok yang ada.

**Kedua, *participatory approach***, dimaksudkan dalam pengembangan model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif menekankan adanya keterlibatan semua komponen dalam keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan.

Out-put dari pengembangan model pengelolaan program pembelajaran kolaboratif adalah terjadinya perubahan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan anak jalanan, sebagai kemampuan awal yang melandasi pembentukan anak jalanan yang mandiri dan produktif.